

EVALUASI PROGRAM OPERASI PANGAN RIAU MAKMUR (OPRM) DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2010-2013

Oleh :

Zamira Ulfa, Muhammad Ridwan*

* adalah mahasiswa dan dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

ABSTRACT

Rice is the staple food of the people of Indonesia , especially in Riau , thus forming Rice Production Enhancement Program in order to increase rice production in Riau , namely Riau Makmur Food Operations program covering Improved Farming Index (IP 100 - IP 200) , Print new Rice and Rehabilitation Abandoned rice fields . This study aimed to evaluate the implementation of the Programme of Food Operations Riau Makmur in the regency. This study focused on Pelalawan because considering the number of problems that occur in the field , namely the realization of Food Operations Program Riau Makmur which is not in accordance with the target . The research problem is how the human resources , infrastructure , program outcomes and the factors inhibiting Food Operations Riau (OPRM) . Based on this background , the study aims to identify the implementation of Food Operations Riau Makmur (OPRM) and to identify the factors that affect the implementation of Operation inhibiting Food Riau Makmur (OPRM) .

This research is descriptive in which researchers provide a description or picture of the phenomenon or social phenomena studied by describing the independent variables systematically and accurately . Methods of data collection is done by observation and interview . The results of this study indicate that in Pelalawan unsuccessful melaksanakan Food Operations Program Riau Makmur (OPRM) seen from the indicators of human resources , infrastructure dann inadequate results and factors - factors that influence that human resources are still low , inadequate infrastructure , lack of role of field workers and less active in the Coordination Node Pos district and village level .

Keywords : Evaluation , OPRM , Pelalawan

Abstrak

Beras adalah bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, termasuk di riau. Sejalan dengan itu pemerintah membentuk program peningkatan produksi padi dalam rangka untuk meningkatkan produksi padi di provinsi riau, yaitu program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) meliputi cara bercocok tanam yang lebih baik (indeks IP 100 sampai IP 200 kk) dengan mencetak sawah baru dan rehabilitasi sawah yang sudah ditinggalkan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan yang meliputi program OPRM di kabupaten tersebut. Studi ini difokuskan pada Pelalawan karena mengingat adanya sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu realisasi program operasi pangan riau makmur

yang tidak sesuai dengan target. Fokus penelitian adalah masalah SDM, infrastruktur, hasil-hasil program dan faktor yang menghambat pelaksanaan program.

Penelitian ini adalah deskriptif di mana para peneliti menyediakan atau gambar deskripsi dari fenomena sosial atau belajar dengan mandiri menggambarkan secara sistematis dan variabel yang tepat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam Pelalawan gagalnya pelaksanaan OPRM dilihat dari indikator daya manusia, dan infrastruktur yang memadai dan faktor faktor yang memengaruhi daya manusia SDM yang masih rendah, infrastruktur yang memadai, peran kurangnya lapangan kerja dan kurang aktif di titik pos koordinasi di tingkat kabupaten kota dan tingkat desa.

Kata Kunci : Evaluasi, OPRM, Pelalawan.

PENDAHULUAN

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Riau selama empat tahun terakhir (2006-2010) terutama beras mengalami peningkatan produksi sebesar 5,73 % /tahun, namun Provinsi Riau hanya mampu mendukung maksimal 45 % kebutuhan konsumsi penduduk. Untuk melengkapi pangan (beras) harus didatangkan dari luar Provinsi Riau, baik antar Provinsi maupun antar negara. Kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa pertumbuhan produksi belum mampu mencukupi perkembangan kebutuhan. Kebutuhan konsumsi penduduk dan ketersediaan pangan (beras) di Provinsi Riau tergantung pada kelancaran dan kesinambungan/distribusi pangan baik antar provinsi maupun impor (LAKIP BKP Provinsi Riau)¹.

Memperhatikan kondisi di atas, Pemerintah Provinsi Riau mengambil program pembangunan pertanian, terutama tanaman padi. Di buatlah kebijakan khusus berupa kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan serta menanggulangi kemiskinan menuju masyarakat tani sejahtera dengan strategi produksi tanaman pangan berupa penguatan kelembagaan dan pembiayaan, pengamanan produksi , perluasan areal dan peningkatan produktivitas yang dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.²

Visi yang ingin dicapai dari program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) adalah terwujudnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pangan yang berwawasan agribisnis dalam rangka menyukseskan program K2I Provinsi Riau. Tujuan yang ingin dicapai dari OPRM adalah :

1. Membangun dan mengembangkan pertanian rakyat secara terpadu yang mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat tani pedesaan dalam usaha penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat tani riau sejahtera.
2. Mengentaskan kantong-kantong kemiskinan di pedesaan melalui bantuan pendanaan dan infrastruktur pertanian.

¹ Dino Predi. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah " Peranan Badan Ketahanan pangan dalam Peningkatan Ketahanan pangan"*. Volume 10 nomor 1 juni 2012. Hal : 7- 8.

² Yoanita Omar dan Ernawati. *Jurnal Administrasi Pembangunan tentang Analisa Implementasi Program Operasi Pangan Riau Makmur*. Volume 1. Nomor 3. Hlm : 316

3. Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi produktif pendesaan melalui peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat sekitarnya, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.
4. Mewujudkan Sumber Daya manusia(SDM) petani yang tungguh dan terampil³.

Dasar Hukum dari kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur yaitu MoU Gubernur Bupati Pelalawan No.74/MoU/2009 dan No. Pllw/180/2009/05 dilanjutkan dengan pernyataan bersama antara Bupati Pelalawan dengan 5 (lima) Kecamatan tentang pelaksanaan pengembangan tanaman padi.

Pemaparan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau pada tanggal 3 Juli 2013 di Meranti menyebutkan Permasalahan Khusus Tanaman Padi sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi budidaya padi oleh petani belum optimal, walaupun sudah diberikan bantuan.
2. Masih tingginya kerusakan tanaman akibat serangan OPT, kekeringan atau kebanjiran.
3. Animo petani dalam usaha petani masih rendah (margin keuntungan masih rendah dibandingkan komoditi perkebunan lainnya).
4. Keterbatasan akses petani terhadap pemodal dan masih tingginya suku bunga usaha tani.
5. Sulitnya mendapatkan lahan yang *Clear* dan *Clean* untuk CSB dan RST.
6. Ketersediaan jalan usaha tani masih kurang dibanding kebutuhan.
7. Keterbatasan alat mesin pertanian.
8. Data mengenai kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur pertanian dan pengairan) belum valid (Data BPS, PU, Distan. Provinsi dan Kab/Kota tidak sama).
9. Pengamanan harga gabah di Tingkat Petani tidak ada (harga gabah dipermainkan/ditetapkan oleh pedagang pengumpul).
10. Stok Gabah di Provinsi Riau saat Panen Raya selalu Kekurangan (Gabah langsung dijual Petani kepada pedagang pengumpul dari Luar Provinsi).
11. Belum optimalnya peran koperasi dalam penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil gabah/beras.
12. Rendahnya Mutu dan Kualitas Gabah yang dihasilkan saat Panen (salah satu penyebab harga jual rendah)
13. Praktek Panen dan Penanganan Pasca Panen yang Kurang Baik.
14. Belum terbentuknya kelembagaan asosiasi pengusaha penggilingan padi (RMU).⁴

Di kabupaten pelalawan sendiri Program Operasi Pangan Riau makmur telah berjalan dalam waktu lima tahun, berbagai usaha dilakukan untuk menjalankan program. Pada tahun 2013 Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada tahun 2013 ini telah menerima penghargaan nomor 2 sebagai Kabupaten terbaik se-Propinsi Riau dalam hal pelaksanaan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) dari Gubernur Riau.

Setiap program harus dievaluasi untuk menentukan apakah program bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien dan untuk diperrangjawabkan pelaksanaannya.⁵ Dengan demikian penulis tertarik untuk mengevaluasi Program Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan, selain itu di Kabupaten Pelalawan merupakan

³ Kesekretariatan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) Dinas Pertanian dan holtikultura provinsi Riau.

⁴ Kesekretariatan Operasi Pangan Riau Makmur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan.

⁵ Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi)*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman : 17

Kabupaten yang sasaran peningkatan Tanam IP 100- IP 200 terbesar no 3 di Propinsi Riau sedangkan Rehabilitasi Sawah Terlantar dan Cetak Sawah Baru terbesar no 1 di propinsi Riau.

Berdasarkan pemaparan data pada tahun 2009 targetnya yaitu 100 dengan hasil realisasinya 100 Ha, pada tahun 2010 yaitu 860 Ha yaitu realisasinya 1.077 Ha, pada tahun 2011 targetnya 982 Ha dan realisasinya 676 Ha, pada tahun 2012 targetnya yaitu 879 dan realisasinya 465 Ha dan pada tahun 2013 yaitu targetnya 840 Ha dan realisasinya yaitu 700 Ha. Dari data tersebut Realiasi Peningkatan tidak mencapai target, target seharusnya yaitu 3.661 Ha dan Realisasinya yaitu 3.018, jika dipersenkanya yaitu 82,43 %.

Data selanjutnya target Rehabilitasi Sawah Terlantar kabupaten pelalawan Data tersebut memaparkan pada tahun 2009 targetnya yaitu 0 dengan hasil realisasinya 0 Ha, pada tahun 2010 yaitu 432 Ha yaitu realisasinya 646 Ha, pada tahun 2011 targetnya 502 Ha dan realisasinya 100 Ha, pada tahun 2012 targetnya yaitu 606 Ha dan realisasinya 30 Ha dan pada tahun 2013 yaitu targetnya 390 Ha dan realisasinya yaitu 150 Ha. Dari data tersebut Realiasi Peningkatan tidak mencapai target, target seharusnya yaitu 1.930 Ha dan Realisasinya yaitu 926 Ha, jika dipersenkan hanya mencapai 47,97 %.

Berdasarkan data tersebut target Cetak Sawah Baru kabupaten pelalawan yakni , memaparkan pada tahun 2009 targetnya yaitu 75 Ha dengan hasil realisasinya 199,5 Ha, pada tahun 2010 yaitu 641 Ha yaitu realisasinya 347,5 Ha, pada tahun 2011 targetnya 1.052 Ha dan realisasinya 836 Ha, pada tahun 2012 targetnya yaitu 1.318 Ha dan realisasinya 845 Ha dan pada tahun 2013 yaitu targetnya 506 Ha dan realisasinya yaitu 525 Ha. Dari data tersebut Realisasi Cetak Sawah Baru tidak mencapai target, target seharusnya yaitu 3.592 Ha dan Realisasinya yaitu 2.753 Ha. jika dipersenkan hanya mencapai 76.642 %.

Dari pemaparan masalah diatas Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, yang menjelaskan bahwa Program Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Mou Gubri-Bupati Pelalawan No.74/Mou/2009 dan No Pllw/180/2009/05 adalah belum berhasil. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Pelalawan dengan Judul : *“Evaluasi Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013”*.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (Soerjono Soekanto 2006: 10).⁶

Lokasi Penelitian ini penulis fokuskan di Kabupaten Pelalawan yakni di Kecamatan Kuala kampar. Lokasi ini penulis pilih karena berdasar sumber yang didapat dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau menunjukkan bahwa Kabupaten yang

sasaran peningkatan Tanam IP 100 - IP 200 terbesar no 3 di Propinsi Riau sedangkan Rehabilitasi Sawah Terlantar dan Cetak Sawah Baru terbesar no 1 di propinsi Riau. Sedangkan dari hasil realisasinya program Operasi Pangan Riau Makmur belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Walaupun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga Dinas Pertanian Tanaman Pangan mendapat penghargaan dari Gubernur Riau pada tahun 2013 sebagai Kabupaten terbaik se-Propinsi Riau dalam hal pelaksanaan program Operasi Pangan Riau Makmur.

Data yang diperoleh langsung dari key informan yang terdiri dari : wawancara mendalam tentang hasil kerja dinas Pertanian Tanaman Pangan tentang melaksanakan Kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan, terutama Kecamatan Kuala Kampar yang merupakan sentra pertanian tanaman padi, serta tanggapan dari petani tentang kondisi dilapangan tentang pelaksanaan Kegiatan Operasi Pangan Riau Makmur. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk menggali informasi tentang : *Pertama*, Realisasi terhadap program Operasi Pangan Riau Makmur; *Kedua*, untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang faktor- faktor yang mempengaruhi kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur. Adapun aktor yang berperan didalam Kebijakan Operasi Pangan Riau makmur adalah Aktor Pemerintah dan Aktor Masyarakat (Petani).

Teknik Pengumpulan data yaitu melalui Observasi, wawancara , dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan info, merupakan sumber kualitatif (Gay dan Airasian, 2000 : 210)⁷

1. Observasi

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang- kadang ia perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang- kadang menggunakan pengamatan orang lain.⁸

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai” interaksi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang. Yaitu yang melakukan wawancara minta informasi Hasan (1963) dalam Garabiyah, 1981:43).⁹

Selanjutnya dianalisis datanya Setelah data yang diperlukan pada penelitian diperoleh , data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis dan macam data. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel- tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif, yaitu sebuah analisa yang yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan - kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013

Evaluasi program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) penulis membahasnya dengan beberapa indikator evaluasinya ini :

⁷Emzir.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*.Jakarta: Rajawali Press Hlm : 37

⁸ Ibid Hlm :37

⁹ Ibid hlm : 50

3.1.Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam Pelaksanaan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013

Sumber daya manusia didalam pelaksanaan program tersebut yakni pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) sesuai dengan Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.521/DISTAN/2013/166 Pengembangan Tanaman Padi Di Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya telah adanya Petunjuk Teknis Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM). Petunjuk teknis tersebut mulai ada sejak tahun 2011. Didalam petunjuk teknis OPRM tersebut memaparkan tentang cara organisasi tata laksana, peran SKPD/institusi terkait, pengelola gerakan OPRM dan cara koordinasinya. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut merupakan modal dan pedoman bagi para pelaksana program dalam menjalankannya. Petunjuk teknis yang telah disusun membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan OPRM.

Sumber daya manusia lainnya adalah adanya tim pelaksana, lembaga penyuluh dan petani, melalui observasi lapangan oleh penulis para tim pelaksananya sudah memadai, karena lembaga penyuluhnya turun tangan untuk membantu para petani dalam proses pelaksanaan Program tersebut.Melihat kondisi lapangan melalui hasil observasi penulis kendala yang terjadi dilapangan yaitu motivasi petani yang besar untuk menanam padi tidak sebanding dengan areal persawahan yang luas. Sehingga ketika petani padi menanam padi tidak menghasilkan penen. Hal terbesar yang menjadi kendala dilapangan yaitu faktor irigasi. Petani padi yang hanya mengharapkan modal musim penghujan. Dan musim penghujannya itu mulai terjadi pada bulan september, dengan demikian petani mulai menanam padi pada bulan september yakni penanaman padi reguler, yaitu penanaman padi sebelum adanya program operasi Pangan Riau Makmur. Dengan demikian program penanaman padi setahun dua kali gagal dilaksanakan karena tidak menghasilkan padi yang ditargetkan, selain itu mengeluarkan tenaga dan biaya yang Ditinjau dari sumber daya manusianya dalam menjalankan Program Operasi Pangan Riau Makmur yakni adanya surat keputusan untuk tim pelaksana, serta adanya petugas lapangan. Namun demikian masih banyak kendala yang terjadi dilapangan, adapun dari segi sarana dan prasarana yang diberikan yaitu kurang maksimal, karena masih kekurangan alat- alat pertanian untuk kegunaan pertanian.

3.2Proses Pelaksanaan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013

Proses didalam pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur, disini penulis memaparkan pola gerakannya yaitu : Keberhasilan gerakan OPRM sangat tergantung dengan adanya peran aktif kepemimpinan formal maupun non formal serta partisipasi seluruh masyarakat, optimalisasi dan sinergi pemanfaatan dana dari APBN, APBD, Perbankan, Swasta serta adanya jaminan harga yang dapat memberi insentif bagi petani untuk berproduksi. Pola pelaksanaan gerakan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Kepemimpinan pemeritah daerah sangat menentukan suksesnya gerakan OPRM, karena itu ketua pelaksana dan Sekretaris agar mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberian informasi yang lengkap dan teratur kepada bupati.

- b. Pertemuan koordinasi yang perlu dijadwalkan untuk dipimpin langsung oleh bupati kepala daerah.

3.2.2 Partisipasi Petani dan Kelompok Petani

Aspek kedua yang sangat penting dan diperhatikan tentang pola gerakan program Operasi Pangan Riau Makmur melalui pemaparan dibawah ini yaitu :

- a. Gerakan OPRM merupakan alat atau instrumen untuk mengusahakan agar petani secara massal mau dan mampu melaksanakan penerapan teknologi baru dengan pendekatan pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).
- b. Gerakan OPRM terlaksana dengan baik apabila kelompok petani mampu menyusun dan melaksanakan RDK/RUK dan RDKK, aparatur pelayanan (koperasi dan perusahaan mitra) mampu melayani kelompok tani sesuai RDK/RUK/dan RDKK, pimpinan daerah, wilayah dan masyarakat mampu berperan sebagai pemimpin gerakan.

3.3 Hasil Pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Ir. Syahfalefi, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Pelalawan mengatakan :

”Didalam proses pelaksanaan OPRM sendiri di Kabupaten Pelalawan secara administrasi Clear. Pada kenyataannya dari 3 program OPRM yakni IP 100-IP 200 yang belum berhasil dilaksanakan sedangkan CSB, RST optimal dilaksanakan”.

Dari penjelasan Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan bahwasannya pelaksanaan Indeks Penanaman IP 100 - IP 200 belum berhasil dilaksanakan, pernyataan bapak tersebut dibuktikan dengan Laporan Akhir Operasi Pangan Riau Makmur tahun 2010 menyebutkan banyak sekali terjadinya kendala teknis dilapangan. Pelaksanaan IP100-200 pada musim tanam I yang dimulai dari bulan Januari s/d Juni 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut¹⁰ :

1. Pencapaian target pada kegiatan IP 100-200 yang direncanakan seluas 1848Ha terialisasi seluas 1077 Ha atau 58,05%.
2. Petani peserta IP 100-200 yang dilaksanakan Bulan Januari s/d Juni 2010 masih mempergunakan penyemaian dengan sistem tugal hingga mempergunakan benih yang cukup banyak yaitu 40Kg/Ha.
3. Kegagalan tanam padi dimusim vegetatif akibat serangan orong-orong dan kepinding tanah seluas 89 Ha yang terdiri dari Desa Sungai Solok 79 Ha dan Desa Teluk Bakau 10 Ha.
4. Kegiatan pendukung IP 100-200 untuk musim tanam I (Januari s/d Juni 2010) belum dapat dipergunakan.
5. Peranan Posko III dan IV dalam kegiatan IP 100-200 belum kelihatan dalam memecahkan masalah dari tingkat Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan pemaparan dari Laporan Akhir tentang OPRM pada tahun 2010 banyak kendala yang terjadi didalam pelaksanaan program. Disisi tersebut bisa dinilai bahwa target yang belum tercapai, gangguan hama tanaman, kegiatan pendukung yang seharusnya tersedia

¹⁰ Laporan Akhir Operasi Pangan Riau Makmur tahun 2010 oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan.

diareal pertanian belum dapat digunakan serta peran serta dari posko Kecamatan dan Desa yang belum signifikan.

Pemaparan Laporan Akhir tentang OPRM menyebutkan bahwasannya pada tahun ini petani tidak melaksanakan penanaman padi dua kali setahun, tapi tetap melakukan penanaman padi reguler yaitu setahun sekali. Hal tersebut diungkapkan oleh kelompok petani Sungai Bagan Ibu Asnah menyebutkan :

“.... Kami pernah melaksanakan IP 100-IP 200 tapi tidak pernah berhasil....”

Selanjutnya pernyataan oleh Bapak Amin menyebutkan :

“sejak pertama program penanaman padi dua kali setahun dimulai, kami sudah menjalani dan mengikuti program tersebut, tapi kami tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan, malahan rugi tenaga, waktu dan biaya. Kegagalan tersebut disebabkan oleh tidak tanam serentak oleh para petani serta serangan hama terutama tikus, wereng, burung dll.”

3.4 Faktor-Faktor Penghambat Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan

3.4.1 Faktor Sumber Daya manusia

Sumber daya yang terlibat di dalam proses pelaksanaan program Operasi Pangan Riau Makmur adalah struktural pemerintahan dan masyarakat. Dilakukan didalam bentuk koordinasi tingkat provinsi, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau, ditingkat kabupaten oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Pelalawan, ditingkat Kecamatan hingga ketinggian desa/kelurahan.

Di dalam kategori sumber daya manusia ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terutama Dinas Pertanian Tanaman pangan sudah mengupayakan untuk menjalankan program Operasi pangan Riau makmur (OPRM) melalui tiga kegiatan yakni peningkatan Indeks Pertanaman IP 100-IP 200, Cetak Sawah baru dan Rehabilitasi Sawah terlantar. Usaha yang telah dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan yaitu dengan menyusun Petunjuk Teknis Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang sudah dirilis sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Fungsi dari Petunjuk teknis tersebut untuk mempermudah pekerjaan fisik dilapangan, tata cara kerja, Pemantapan dan Koordinasi, selain itu Pos Simpul Koordinasi Kabupaten setiap bulannya telah mengadakan rapat evaluasi dalam rangka membahas masalah-masalah yang terjadi dilapangan dan mencari solusi masalah tersebut. Dengan demikian penulis menilai usaha yang dilakukan oleh Pos Simpul Koordinasi sudah memadai, para petugas dilapangan bekerja keras didalam mengupayakan pelaksanaan program Operasi Pangan Riau makmur untuk swasembada beras di Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini bupati Pelalawan memberikan perhatian didalam program tersebut dengan turut serta menghadiri acara di Kuala Kampar sebagai sentra padi Kuala Kampar yaitu syukuran turun benih, panen raya, serta rapat koordinasi. Tidak terlepas dari itu juga Bupati Pelalawan telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor : KPTS.521/DISTAN/2013/166 tentang pembentukan Tim koordinasi Operasi Pangan Riau makmur (OPRM) pengembangan Tanaman Padi di kabupaten Pelalawan tahun 2013.

Sumber daya manusia selanjutnya dengan adanya petugas lapangan yang langsung terkoordinasi di Kecamatan yaitu BP3K Kecamatan, di desa akan ada penyuluh pertanian yang akan membantu petani dalam mengolah pertanian padinya. Hambatan yang terjadi dilapangan yaitu kurangnya penyuluh disetiap desa. selain itu tidak menyebarnya informasi kepada para petani sehingga mempengaruhi didalam proses pelaksanaan program Operasi

Pangan Riau Makmur, ada sebagian petani yang menghasilkan beras dengan jumlah besar dan juga sebaliknya ada petani yang kurang berhasil panen. Melalui hasil wawancara penulis dengan petani padi Sungai Bagan, Kuala Kampar, bapak tersebut menyatakan :

“ Penyuluh petani tidak banyak turun langsung ke semua tempat areal pertanian padi , sehingga kami kekurangan informasi untuk menanam padi, seperti bertanya tentang banyaknya hama, organisme pengganggu tanaman cara membasminya dll. Program pemerintah penanaman padi setahun dua kali dilahan yang sama kurang berjalan. Selain itu petugas pertanian mengadakan diskusi forum seminar jauh di area pertanian yakni di Kecamatan sehingga yang datang petaninya itu terbatas ”

Melalui pernyataan tersebut bisa digambarkan bahwasannya masih kurangnya penyuluh pertanian di setiap desa. Penyuluh pertanian yang akan memberikan arahan dan penyuluhan untuk meningkatkan hasil produksi beras ternyata terbatas.

Sedangkan untuk partisipasi petani terutama di Kabupaten Pelalawan, di Kecamatan Kuala Kampar khususnya sangat tinggi. Petani mengerjakan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga petani yang menggarap sawah itu berasal dari desa lain yang datang ke areal khusus pertanian. Dimana tetap saja penanaman padi setahun sekali tersebut tidak menghasilkan produksi padi yang besar, malahan petani yang dirugikan. Walaupun petani banyak berasal dari desa lain, tetap saja masih kekurangan petani, karena areal yang bertambah luas sehingga padinya tidak terjaga maksimal, karena hama seperti burung dan tikus yang merusak tanaman padi. Kelompok petani dan petani juga bukan sekali saja melakukan penanaman padi setahun dua kali, tapi sudah sangat banyak dan tetap saja tidak menghasilkan produksi beras yang besar. Selain itu faktor lain yang mempengaruhinya yaitu petani tidak sepenuhnya konsentrasi didalam menanam padi yang dipengaruhi oleh kegiatan para petani untuk panen hasil kelapa yang biasanya dipanen 3 bulan sekali dalam setahun. Dengan demikian sumber daya manusia terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan petani sudah berusaha untuk menghasilkan produksi beras, hanya saja tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu sumber daya manusia dibagian petaninya kurang berpartisipasi aktif.

3.4.2 Faktor Infrastruktur

Membahas tentang infrastruktur yang dikaji yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program operasi Pangan Riau makmur. Di Kecamatan Kuala Kampar merupakan sentra pertanian Tanaman Padi tapi akses jalan yang sulit ditempuh kelokasi pertanian sehingga mempengaruhi jarak waktu tempuh. Melalui observasi lapangan oleh penulis jalan yang disemenisasi itu berukuran lebar 30 cm hingga 1 m, sehingga menyebabkan sulit untuk ditempuh dan sebagiannya lagi masih jalan tanah.

Infrastruktur yang kurang memadai ini menjadi faktor penghambat petani untuk menuju lokasi pertanian dan petani harus sangat berhati hati untuk meniti jalan tersebut karena jalannya telah rusak sehingga mudah menyebabkan terjatuh atau tergelincir. Selain itu menurunkan semangat petani untuk menanam padi. Untuk mensiasati hal tersebut para petani membuat rumah pondokan kecil di areal persawahan untuk menginap karena lokasi yang jauh dari rumah.

Selain itu sarana dan prasarana lain yaitu alat - alat pertanian yang dibantu oleh pemerintah seperti pintu usaha tani, galangan, drempel, racun, berbisida, benih, traktor belum mencukupi. Areal pertanian yang luas harus dibarengi dengan alat - alat yang lengkap untuk mempermudah didalam melakukan pekerjaan.

Hal yang terpenting juga yaitu saluran irigasi yang tidak memadai yang menyebabkan padi tidak tumbuh dan akhirnya mati. Kita ketahui faktor kekurangan air sehingga areal menjadi kekeringan dan tidak menghasilkan padi. Karena pengaruh kekurangan saluran irigasi, proses perawatan saluran irigasi yang tidak rutin dilaksanakan. Di Kuala Kampar padi sangat memerlukan air supaya tumbuh besar, hanya saja saluran irigasi dan masih minimnya tempat penyimpanan air ketika musim kemarau.

Infrastruktur merupakan hal penting untuk diperhatikan untuk menjalankan kegiatan dan aktivitas dilapangan, dapat dilihat di Kabupaten Pelalawan terutama di Kuala Kampar infrastruktur yang tidak memadai menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Operasi Pangan Riau makmur (OPRM).

3.4.3 Faktor Pos Simpul Koodinasi

Pos Simpul Koordinasi (POSKO) yang sudah diatur dalam melaksanakan gerakan OPRM pada setiap tingkatan organisasi yaitu POSKO I ditingkat provinsi, POSKO II ditingkat Kabupaten, POSKO III di Kecamatan dan POSKO IV ditingkat Desa/ Kelurahan. Tujuan diadakannya Pos simpul Koordinasi yakni untuk melaporkan kegiatan Peningkatan Indeks Pertanaman IP 100-IP 200, Rehabilitasi Sawah Terlantar dn Cetak Sawah Baru, pelaporan benih, penyaluran pupuk, pestisida dll.

Pos Simpul Koordinasi yang ditataran Provinsi dan Kabupaten sudah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) sedangkan untuk pihak Kecamatan dan Desa belum terlihat kinerjanya yang signifikan. Sehingga menjadi penghambat didalamnya. Posko Kecamatan dan Posko Desa merupakan aspek yang paling penting karena petugas lapangan yang langsung terjun dilapangan untuk mengawasi, mengarahkan petani padi dan mengadakan rapat koordinasi setiap minggu/bulannya. Karena keterbatasan yang dimiliki pihak kecamatan dan desa sehingga tidak optimal dalam menjalankan program menyebabkan penghambat dalam pelaksanaan Operasi Pangan Riau makmur (OPRM).

Dengan demikian koordinasi yang tidak seluruhnya lancar dari Desa hingga ke Kabupaten yang menyebabkan tingkatan organisasi Pos Simpul Koordinasi Kecamatan dan Desa tidak bekerja dengan baik. Koordinasi yang kurang itu disebabkan komunikasi yang tidak sejalan, semua aspek dan pelaksana program mulai dari penyuluh petani dan petani harus benar - benar sejalan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa program Operasi Pangan Riau Makmur yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat belum mampu untuk meraihnya, petani belum mampu untuk menghasilkan beras yang ditargetkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan penulis, peneliti mengambil kesimpulan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan kurang berhasil dilaksanakan. Terdapat beberapa indikator evaluasi kebijakan yaitu melalui Sumber Daya manusia nya yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Penyuluh Pertanian dan Petani. Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dikenal juga Pos Simpul Koordinasi tingkat II sudah optimal dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan kegiatan fisik yang ditandai dengan adanya rapat koordinasi posko di tingkat Kabupaten, serta adanya petunjuk teknis Operasi Pangan Riau makmur di Kabupaten Pelalawan, serta adanya surat keputusan tentang koordinasi, sedangkan Infrastruktur masih kurang memadai yang ditandai jalan tidak lebar dan terdapat banyak kerusakan. Indikator yang kedua, Proses pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur ini harus dilihat dari segi Kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Partisipasi petani, adapun

Pemerintah Daerah berusaha keras untuk menjalankan program tersebut dan partisipasi petaninya ada. Indikator selanjutnya yaitu hasilnya yakni Program Peningkatan Indeks Pertanaman IP 100 - IP 200, Cetak Sawah Baru, dan Rehabilitasi Sawah Terlantar realisasinya tidak sesuai dengan target sehingga mempengaruhi hasil produksi beras tidak bertambah secara signifikan, selain itu adanya program Cetak Sawah Baru dan Rehabilitasi Sawah Terlantar menambah luas lahan pertanian tapi tidak diimbangi dengan kuantitas petani yang masih minim.

Terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur yakni Sumber Daya Manusia yang masih rendah terutama petaninya, petugas lapangan yang kurang komitmen serta minimnya penyuluhan di tingkat Kecamatan/ Desa. Faktor lain nya yaitu Infrastruktur daerah yang minim sehingga menghambat aktivitas petani untuk akses kelokasi pertanian, ditinjau dari sarana dan prasarana yang minim seperti saluran irigasi tidak memadai, dengan tidak memadai saluran irigasi proses pertumbuhan tanaman padi akan terhambat karena tidak adanya penampungan air yang seharusnya solusi ketika musim kekeringan, Organisme Pengganggu Tanaman seperti Hama wereng, ulat, tikus mudah menyerang tanaman padi karena jumlah petani yang menanam padi setahun dua kali lebih sedikit dibandingkan musim tanam reguler. Faktor penghambat lainnya yaitu tidak beroperannya Pos Simpul Koordinasi Tingkat Kecamatan dan pos Simpul koordinasi tingkat Desa. Melihat program yang dijalankan Pemerintah Daerah tersebut, solusi yang ditawarkan melalui indikator evaluasi program Operasi Pangan Riau Makmur yaitu harus adanya komitmen semua pihak yang terlibat, Infrastruktur di perbaharui dan membuat sebuah program yang selaras untuk mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.
- Inu Kencana Syafii. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung :Pustaka Reka Cipta.
- Penyunting : Roem Topatimasang, dkk. 2005. *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Insist Press
- Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan profesi)* Jakarta. Rajawali pers
- Riant Nugroho. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Riant nugroho. *Pubic policy (dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan)* . Jakarta. Elex Komputindo
- Salim dkk. 2006. *Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (mou)*. Jakarta. Sinar grafika. Jakarta
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta .Gava Media
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi kepenyusunan model - model implementasi kebijakan publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sri handayani. *Ilmu politik dalam kebijakan kebijaksanaan*. Yogyakarta .Gosyen Publishing.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung .Alpabeta
- Wayne Persons. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Prakatik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Widodo.2012.*Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta Timur : Magna Script Publishing.

Skripsi, Thesis dan Jurnal

Dino predi. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah “Peranan Badan Ketahanan Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan”*. Volume 10. Nomor 1 Juni 2012.

Muchlis Hamdi. *Membangun Kebijakan Publik yang administratif* - Jurnal Ilmu Pemerintahan. Pengurus Pusat Ilmu Pemerintahan (MIPI)

Skripsi Firmasnyah .2008. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kec. Kampar Kiri Hulu (Studi Kasus Pengembangan Kecamatan (PKK) tahun 2006*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan IP FISIP UR.

Skripsi Lasino. 2011. *Dinamika Pemerintah dan Implementasi Program Pengembangan Tanaman Padi di Kec. Bunga Raya. Kabupaten Siak tahun 2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan IP FISIP UR.

Tesis Defflides Gusni.2012. *Studi Implementasi Kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Kuantan Sengingi*. Program Pasca Sarjana Fisip Universitas Riau.

Yoanita Omardan Ernawati. 2013. *Jurnal Administrasi Pembangunan tentang Analisa Implementasi Program Operasi Pangan Riau Makmur*. Volume 1, Nomor 3.

Daftar Bacaan Lain dan Internet

Bambang, D dan Rati Riana. 2005. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Hamidi. 2004. *Metode penelitian kualitatif. Aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*. Malang: UMM PRESS.

Pusat bimbingan dan pengembangan bahasa departemen Pendidikan Nasional RI . 2010. *Panduan EYD dan tata bahasa Indonesia*. Jakarta : Redaksi TransMedia

Tim Penyusun Buku Pedoman penulisan dan prosedur Ujian Fisip Universitas Riau. 2008. *Pedoman penulisan dan prosedur ujian skripsi fisip unri*. Pekanbaru: UR PRESS

Widodo. 2012. *Cerdik menyusun proposal penelitian skripsi, thesis, dan disertasi*. Jakarta Timur : Magna Script Publishing

Pelalawan dalam angka 2013. Badan pusat Statistik Kabupaten Pelalawan.

Kuala Kampar dalam angka 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan.

[http ://Respository.usu.ac.id](http://Respository.usu.ac.id)

[http ://Kab.Pelalawan.go.id](http://Kab.Pelalawan.go.id)